

1. Sumber Buku dan Karya Ilmiah

Buku

Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang- Undang Antimonopoli: Undang- Undang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta : Elex Media komputindo, 1999)

Aberrer Saleng, *hukum pertambangan*, UII Press 2004, Cet I, Jogjakarta 2004

Adrian Sutedi, *hukum Pertambangan*, Penerbit Sinar Grafika, jakarta, 2011

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, cet.1.(Jakarta: Raya Grafindo Persada,1999)

Apeldoorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya paramita, Jakarta, 2008

Arie Siwanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Ghalia, Indonesia, Cet. Pertama, 2002

Bagir Manan, *Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian*, Seminar Nasional Pertambangan, LP-UNPAD, Bandung, 1995

Bagir Manan, *Beberapa catatan atas rancangan Undang-undang tentang Minyak dan gas bumi*, FH-UNPAD, Bandung, 1999

Budiono Kusumohamidjojo, *filsafat hukum : problematik ketertiban yang adil*. Penerbit Mandar Maju, 2011, Bandung

Elka Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *hukum dalam ekonomi*, edisi revisi, penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005

Gatot Supramono, *hukum pertambangan mineral dan batu baradi indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Februari 2012



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Hermansyah, *Universitas Gadjah Mada*, 2017, diakses dari <http://eprints.ugm.ac.id>

PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IJIN EKSPORT BIJIH MINERAL PT. FREEPORT INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MINERAL DAN BATUBARA KHUSUSNYA MENGENAI
PELARANGAN EKSPORT BIJIH
MINERAL SERTA HUKUM PERSAINGAN USAHA

Romano Sitompul, Prof. M. Hawin, SH., LL.M., PhD

Kencana, Cet. Pertama, Jakarta

Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Ismail saleh, *hukum dan ekonomi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990

Jonker Sihombing, *peran dan Aspek Hukum dalam pembangunan ekonomi*, penerbit alumni,
Bandung, 2010

Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008

Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, Jakarta, 1996

M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi*, Tiara
Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997

Ronny Hanitjo Soemitro, *metodologi Penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta : Indonesia,
1990

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2008

_____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006

_____, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, edisi revisi

_____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

_____, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008

_____, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2008



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IJIN EKSPORT BIJIH MINERAL PT. FREEPORT INDONESIA
DIHUBUNGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MINERAL DAN BATUBARA KHUSUSNYA MENGENAI
PELARANGAN EKSPORT BIJIH
MINERAL SERTA HUKUM PERSAINGAN USAHA
Romano Sitompul, Prof. M. Hawin, SH., LL.M., PhD
Sonny Keraf, *Presiding Director Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*

nasionalisasi atau privatisasi, PT Justika siar Publika, 2009

Sudikno Mertokusumo, *teori hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Sudjito, *Imu Hukum Holistik ;Studi untuk memahami kompleksitas dan pengaturan pengelolaan irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika sebagai asas hukum bagi pembangunan hukum nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

_____, *hukum ekonomi pembangunan Indonesia*, Bandung, 1982

Karya Ilmiah

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, *Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi atas Putusan MK mengenai Judicial Review UU No.7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 1. Februari 2010

Romano Sitompul, *Tinjauan Yuridis Implikasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral N0.07/2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dikaitkan Dengan Kesiapan Pengusaha Nasional*, Skripsi Fakultas Hukum Unpad, 2012

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)

Undang-Undang Pertambangan No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam negeri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 15 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Energi dan Sumber daya Mineral

Keputusan Presiden No 59/ P tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011

Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.

Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 07 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral

Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 20 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 07 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IJIN EKSPORT BIJIH MINERAL PT. FREEPORT INDONESIA
DIHUBUNGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MINERAL DAN BATUBARA KHUSUSNYA MENGENAI
PELARANGAN EKSPORT BIJIH
MINERAL SERTA HUKUM PERSAINGAN USAHA

Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri
Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri

3. Sumber Lain

Bisnis.com/”Freeport Tunduk“, diakses pada tanggal 24 Januari 2017

Detik.com/” Freeport Ajukan Syarat untuk IUPK, ESDM: Ikuti Aturan”, diakses pada tanggal 24 Januari 2017

Hukumonline/”MK Kukuhkan Larangan Ekspor Bijih Ore”, diakses pada tanggal 18 Desember 2016

Hukumonline/”perpanjang ekspor freeport pemerintah dinilai langgar uu minerba”, diakses pada tanggal 18 Desember 2016

Kompas.com/”Freeport Bersedia Ubah Status Kontrak Karya Jadi IUPK, Apa Bedanya?”, diakses pada tanggal 24 Januari 2017

Liputan6.com /Pebrianto Eko Wicaksono, “Eskpor Bijih Mineral Distop Pengusaha Tambang Rugi Rp 45 Triliun”, diakses pada tanggal 18 Desember 2016

Liputan6.com /”freeport mulai ekspor mineral RI pada 6 agustus”, diakses pada tanggal 18 Desember 2016

Mahkamahkonstitusi.go.id/Romano Sitompul, “*Penghentian Izin Ekport Freeport menunjukkan Indonesia Negara Berdaulat*”, diakses pada tanggal 18 Desember 2016